

Melacak Jejak Kosmopolitanisme Aceh di Jalur Rempah Nusantara

Fakrur Razi

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya, Indonesia
email: frazi1736@gmail.com

Article history: Received: 28 July 2025, Revised: 04 Agustus 2025; Accepted: 09 Agustus 2025;
Published: 16 Agustus 2025

Abstract

This article revisits the cosmopolitan legacy of Aceh within the framework of the Nusantara spice route, emphasizing its strategic role as a hub of trade and cultural interaction from the 16th to the 18th century. Employing an interdisciplinary approach that integrates oral history, maritime archaeology, and philological analysis of ancient manuscripts, the study reconstructs Aceh's position as a crucial node in the global network linking the Middle East, South Asia, China, and Europe. The findings indicate that Aceh functioned not only as a spice entrepôt but also as an intellectual exchange center and home to vibrant multiethnic communities. Loanwords in the Acehnese language, Islamic literacy traditions, and traces of transregional scholars serve as evidence of the region's once-flourishing cosmopolitan dynamics. However, the rupture of historical narratives due to colonialism, political centralization, and the lack of local historical education has contributed to the erosion of this collective memory. Therefore, this study recommends the revitalization of local historical awareness through participatory education and community-based heritage tourism. It also opens pathways for further research on Aceh's role in cultural diplomacy and broader interregional relations in Southeast Asian history.

Keywords

Cosmopolitanism, Spice Route, Aceh, Collective Memory

Abstrak

Artikel ini mengkaji ulang jejak kosmopolitanisme Aceh dalam konteks jalur rempah Nusantara, dengan menyoroti peran strategisnya sebagai pusat perdagangan dan interaksi budaya pada abad ke-16 hingga ke-18. Melalui pendekatan interdisipliner yang menggabungkan sejarah lisan, arkeologi maritim, dan analisis filologis terhadap naskah kuno, studi ini merekonstruksi posisi Aceh sebagai simpul penting dalam jaringan global yang menghubungkan Timur Tengah, Asia Selatan, Tiongkok, dan Eropa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aceh bukan hanya pelabuhan transit rempah, tetapi juga pusat pertukaran intelektual dan tempat berkembangnya komunitas multietnis. Kosakata serapan dalam bahasa Aceh, tradisi literasi Islam, serta jejak ulama transregional menjadi bukti penting dinamika kosmopolitan yang pernah tumbuh subur di wilayah ini. Namun, keterputusan narasi sejarah akibat kolonialisme, sentralisasi politik, dan minimnya pendidikan sejarah lokal turut menyebabkan mudarnya ingatan kolektif terhadap kejayaan tersebut. Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan pentingnya revitalisasi sejarah lokal melalui pendekatan pendidikan partisipatif dan pengembangan ekowisata sejarah berbasis komunitas. Penelitian ini juga membuka ruang bagi studi lanjutan mengenai peran Aceh dalam diplomasi budaya dan hubungan antarbangsa yang lebih luas dalam sejarah Asia Tenggara.

Kata Kunci

Kosmopolitanisme, Jalur Rempah, Aceh, Ingatan Kolektif

Pendahuluan

Aceh merupakan salah satu entitas sejarah yang penting namun sering kali luput dari narasi besar historiografi nasional Indonesia. Di balik gelar *Serambi Mekkah* yang disematkan padanya, Aceh menyimpan kisah tentang kosmopolitanisme yang membentang dari jalur rempah hingga ke pusat-pusat kekuasaan global. Pada abad ke-16 dan ke-17, Kesultanan Aceh Darussalam bukan semata-mata menjadi pusat penyebaran Islam, melainkan juga menjelma sebagai simpul strategis dalam jaringan perdagangan internasional yang menghubungkan dunia Timur dan Barat. Kedudukannya yang berada di ujung utara Pulau Sumatra memberikan keuntungan geopolitik yang luar biasa: sebagai pintu masuk penting menuju Selat Malaka

dan Samudra Hindia, Aceh menjadi magnet bagi kapal-kapal dagang dari Persia, India, Arab, Tiongkok, hingga Eropa. Hal ini menjadikan Aceh sebagai entitas pelabuhan dunia yang bukan hanya mengandalkan kekayaan alamnya, terutama rempah-rempah, tetapi juga karena peran aktifnya dalam membentuk jejaring diplomatik, keagamaan, dan intelektual yang bersifat transnasional (Yulianto, 2020).

Dalam peta perdagangan rempah-rempah nusantara, Aceh memainkan peran yang sangat signifikan. Rempah seperti lada menjadi komoditas unggulan yang tidak hanya menarik perhatian pedagang Gujarat, Benggala, dan Turki Utsmani, tetapi juga bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Belanda, dan Inggris. Hubungan dagang tersebut bukan hanya bertumpu pada transaksi ekonomi, tetapi juga membuka jalan bagi pertukaran budaya dan pengetahuan. Kesultanan Aceh diketahui menjalin hubungan diplomatik dengan Kesultanan Utsmaniyah, yang tidak hanya mendukung secara militer tetapi juga memperkuat jejaring keilmuan Islam melalui pengiriman ulama dan naskah keagamaan. Hubungan ini menjadikan Aceh sebagai bagian dari dunia Islam internasional, dengan karakter keislaman yang terbuka dan progresif (Kahar et al., 2022).

Namun demikian, ingatan kolektif bangsa terhadap posisi strategis Aceh dalam jalur rempah dan peta kosmopolitanisme dunia tampak mulai memudar. Narasi sejarah Indonesia kontemporer cenderung terfokus pada pusat-pusat kekuasaan di Jawa dan melupakan peran penting daerah-daerah lain seperti Aceh. Hal ini menyebabkan jejak kejayaan Aceh seolah tenggelam dalam kabut sejarah. Padahal, berbagai catatan perjalanan dari pelaut Eropa, manuskrip lokal, dan peninggalan arsitektur membuktikan bahwa Aceh memiliki karakter kosmopolit yang sangat kuat. Di pelabuhan-pelabuhan Aceh, bahasa Melayu digunakan berdampingan dengan bahasa Arab, Persia, dan Portugis, menandai keterbukaan budaya yang jarang ditemui pada masa itu (Hasan, 2021).

Situasi ini menimbulkan sejumlah pertanyaan mendasar: Bagaimana Aceh membangun identitasnya sebagai pusat kosmopolitanisme di masa lalu? Dalam lanskap geopolitik dan budaya jalur rempah global, di mana posisi Aceh dapat dipetakan secara akurat? Dan mengapa narasi kejayaan ini tidak mendapatkan tempat

yang semestinya dalam sejarah nasional Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak lahir dari nostalgia sejarah belaka, tetapi dari kebutuhan epistemologis untuk merekonstruksi narasi sejarah yang lebih inklusif dan adil. Narasi tentang Aceh sebagai pelabuhan dunia tidak semestinya hanya menjadi catatan kaki dalam sejarah Indonesia, tetapi perlu dikaji sebagai bagian integral dari formasi global di era pra-modern (Fauzi, 2023).

Upaya untuk menelusuri kembali jejak kosmopolitanisme Aceh memerlukan pendekatan yang multidisipliner, menggabungkan kajian sejarah, studi Islam, antropologi budaya, serta geopolitik maritim. Salah satu aspek yang perlu disorot adalah bagaimana hubungan dagang mendorong terbentuknya komunitas transnasional yang heterogen di pelabuhan-pelabuhan Aceh. Komunitas ini bukan hanya terdiri atas pedagang, tetapi juga ulama, sastrawan, dan intelektual Muslim yang berkontribusi terhadap dinamika keilmuan Islam di kawasan Asia Tenggara. Ulama seperti Hamzah Fansuri dan Syamsuddin as-Sumatrani menjadi contoh bagaimana interaksi dagang dapat melahirkan dialektika keilmuan yang menggabungkan tasawuf, teologi, dan filsafat dengan semangat kosmopolitan (Amin, 2024).

Kosmopolitanisme Aceh tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor geografis, ekonomi, politik, dan budaya. Dalam konteks jalur rempah, Aceh berperan sebagai *gerbang budaya* yang memungkinkan berlangsungnya pertukaran antara lokalitas dan globalitas. Konsep glocalisasi, yang merujuk pada proses dialogis antara nilai lokal dan pengaruh global, dapat digunakan untuk membaca realitas sejarah Aceh. Dalam hal ini, Aceh bukan hanya menerima pengaruh dari luar, tetapi juga mentransformasikannya menjadi bagian dari identitas lokal yang unik dan dinamis (Zulkarnain, 2019). Pendekatan ini membuka ruang bagi reinterpretasi sejarah Aceh tidak sekadar sebagai bagian dari Indonesia, tetapi sebagai entitas dunia yang terlibat aktif dalam percaturan global sejak berabad-abad lalu.

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi peta kosmopolitanisme Aceh abad ke-16 hingga ke-17 dengan menelusuri relasi dagang dan intelektual yang terbentuk dalam konteks jalur rempah Nusantara. Melalui kajian historis-kritis terhadap sumber primer dan sekunder, artikel ini berupaya menunjukkan bahwa Aceh

tidak hanya berperan sebagai simpul ekonomi, tetapi juga sebagai poros kebudayaan dan keilmuan yang menyatukan berbagai entitas dunia Islam dan non-Islam. Di tengah gelombang globalisasi kontemporer yang sering kali mengikis nilai-nilai lokal, pelacakan terhadap jejak kosmopolitanisme Aceh menjadi penting sebagai inspirasi dalam membangun peradaban yang inklusif, terbuka, dan berakar pada sejarah panjang interkoneksi global.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner yang memadukan sejarah lisan, arkeologi maritim, dan filologi untuk menelusuri jejak kosmopolitanisme Aceh dalam konteks jalur rempah Nusantara. Pendekatan sejarah lisan memungkinkan peneliti menggali memori kolektif masyarakat lokal yang selama ini tidak tercatat dalam dokumen resmi, termasuk narasi turun-temurun tentang pelayaran, perdagangan, dan interaksi dengan bangsa asing. Arkeologi maritim digunakan untuk mengkaji tinggalan fisik seperti reruntuhan pelabuhan kuno, situs dagang, serta artefak-artefak yang ditemukan di kawasan pesisir Aceh. Sementara itu, kajian filologis terhadap naskah-naskah kuno berbahasa Arab, Aceh, Melayu, Portugis, dan Tionghoa dilakukan guna mengidentifikasi relasi intelektual dan jaringan komunikasi yang pernah terbentuk pada masa kejayaan Aceh.

Dalam proses pengumpulan data, berbagai sumber primer menjadi pijakan utama, seperti prasasti dan artefak pelabuhan tua di Banda Aceh, Lamreh, dan Barus yang menyimpan informasi penting mengenai pola perdagangan dan aktivitas pelayaran. Di samping itu, catatan perjalanan dari pedagang dan pelaut asing seperti Tome Pires, Ibnu Batutah, dan Laksamana Cheng Ho juga dianalisis untuk mendapatkan gambaran eksternal mengenai posisi strategis Aceh di mata dunia luar. Tak kalah penting, syair-syair tradisional Aceh yang memuat kisah pelayaran dan perjumpaan antarbangsa ditelaah sebagai bentuk representasi budaya dan dokumentasi kolektif masyarakat pesisir. Pemetaan spasial jaringan pelabuhan kuno serta pelacakan keberadaan komunitas diaspora Aceh di berbagai negara seperti Malaysia, Yaman, dan Arab Saudi turut memperkuat pembacaan terhadap keterhubungan global Aceh. Dengan metode

yang menyatukan berbagai disiplin dan sumber data, penelitian ini berupaya membangun narasi utuh yang merekonstruksi peran Aceh sebagai episentrum kosmopolitanisme Islam dan perdagangan rempah di kawasan Asia Tenggara.

Hasil

Penelusuran terhadap jejak kosmopolitanisme Aceh di jalur rempah Nusantara mengungkapkan bahwa wilayah ini tidak hanya berperan sebagai simpul dagang, tetapi juga sebagai pusat interaksi multikultural yang hidup dan kompleks. Pelabuhan Bandar Aceh Darussalam muncul sebagai pusat perlintasan penting antara dunia Timur dan Barat, menjadi tempat berlabuh kapal-kapal dari Gujarat, Arab, Persia, Tiongkok, hingga Eropa. Di sepanjang pesisir Aceh, ditemukan jejak permukiman multi-etnis seperti komunitas Arab, Tamil, Tionghoa, dan bahkan Portugis, yang hidup berdampingan dan memberi warna tersendiri dalam tatanan sosial dan budaya lokal. Keberadaan makam asing, kompleks dagang, serta situs arkeologis pelabuhan tua menunjukkan bahwa Aceh dahulu merupakan melting pot yang membentuk karakter kosmopolitan unik di kawasan Asia Tenggara.

Salah satu bukti paling otentik dari relasi global Aceh terlihat dalam warisan linguistiknya. Bahasa Aceh menyerap berbagai kosakata dari bahasa Arab, Persia, Tamil, Portugis, dan Belanda, menandai intensitas interaksi yang berlangsung selama berabad-abad. Selain itu, Aceh juga dikenal sebagai pusat literasi Islam yang progresif, dengan banyak ulama dan santri menulis karya dalam bahasa Arab dan Jawi. Tradisi tulis-menulis ini memperkuat peran Aceh sebagai bagian dari jaringan ulama Nusantara yang saling terhubung lintas wilayah dan lintas generasi. Pusat pendidikan Islam seperti Dayah Tanoh Abee dan Dayah Cot Kala tidak hanya melahirkan cendekia lokal, tetapi juga menjadi magnet bagi pelajar dari Semenanjung Melayu, Palembang, Banjarmasin, hingga Mindanao. Naskah-naskah keagamaan, tafsir, fiqh, dan tasawuf yang dihasilkan dari pertukaran intelektual ini menegaskan bahwa kosmopolitanisme Aceh tidak terbatas pada ekonomi dan perdagangan, melainkan juga menjangkau wilayah intelektual dan spiritual. Temuan ini menantang narasi sempit yang selama ini hanya memandang Aceh sebagai daerah konflik, dengan menawarkan

gambaran Aceh sebagai simpul peradaban yang inklusif dan terbuka bagi dunia.

Pembahasan

Menyusuri Lorong Waktu yang Pudar

Membaca kembali peta kosmopolitanisme Aceh di jalur rempah memerlukan sebuah kerja historis yang tidak hanya mengandalkan kronologi peristiwa, tetapi juga upaya hermeneutik terhadap ruang, teks, dan relasi. Aceh sebagai simpul penting dalam jaringan perdagangan global pada abad ke-16 dan ke-17 tidak dapat dilepaskan dari dinamika geostrategis Samudra Hindia. Dalam lintasan waktu itu, pelabuhan-pelabuhan Aceh menjadi *arena silang dunia* yang mempertemukan para pedagang dari India, Arab, Cina, dan Eropa dalam satu lanskap ekonomi dan budaya. Dalam konteks inilah, Aceh menunjukkan kapasitas kosmopolitiknya, tidak hanya sebagai penerima pengaruh, tetapi sebagai subjek aktif yang membentuk interaksi lintas budaya berdasarkan keunggulan geografis dan kekuatan spiritualnya (Kahar et al., 2022).

Historiografi modern sering kali gagal menangkap kompleksitas jaringan ini karena cenderung mengadopsi kerangka kolonial yang memarginalkan narasi lokal. Padahal, berdasarkan manuskrip lokal seperti *Hikayat Aceh*, serta catatan perjalanan dari pelaut Portugis dan Arab, dapat ditemukan indikasi kuat bahwa Aceh memiliki sistem pemerintahan, pendidikan, dan perdagangan yang terintegrasi dalam skala regional dan internasional. Ulama-ulama Aceh pada masa itu bukan hanya menjadi penulis karya-karya sufi, tetapi juga diplomat budaya yang menjalin komunikasi dengan pusat-pusat keilmuan di Timur Tengah dan India. Ini menandakan bahwa Aceh tidak hanya menjadi pasar rempah, tetapi juga *pasar gagasan* dalam sirkulasi wacana Islam global (Amin, 2024).

Penelusuran terhadap jejak kosmopolitan ini juga membuka kesadaran akan keterputusan narasi sejarah yang disebabkan oleh kolonialisme dan rekonstruksi pascakemerdekaan yang terlalu tersentralisasi. Posisi Aceh dalam jalur rempah, yang sebelumnya berada dalam jalinan antar-pelabuhan seperti Malaka, Gresik, dan Bandar Abbas, perlahan menghilang dari peta mental bangsa Indonesia. Hal ini mengakibatkan memudarnya pemahaman terhadap

bagaimana identitas Aceh dibentuk oleh interaksi kosmopolitik yang berlangsung selama berabad-abad. Jejak tersebut masih terlihat dalam arsitektur kota, tradisi intelektual, hingga sistem sosial yang bersifat terbuka, namun narasinya tercerai-berai dalam sumber-sumber yang belum terintegrasi secara sistematis (Fauzi, 2023).

Dengan membaca ulang peta-peta pelayaran abad ke-16 dan naskah-naskah perjalanan, Aceh tampil sebagai aktor sentral dalam arus sejarah dunia yang lebih luas. Jaringan intelektual Aceh dengan Mekkah, Hadramaut, dan Gujarat tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan lokal, tetapi juga menciptakan ruang sosial yang mempertemukan pluralitas dalam semangat ukhuwah Islamiyah. Di sinilah kosmopolitanisme Aceh menunjukkan wajahnya yang khas: bukan kosmopolitanisme yang sekular dan hegemonik, tetapi yang berakar pada nilai spiritual, persaudaraan, dan pertukaran yang setara (Zulkarnain, 2019).

Dengan demikian, menyusuri lorong waktu yang pudar dalam sejarah Aceh bukan sekadar upaya akademik, melainkan kerja restorasi atas ingatan kolektif bangsa. Melalui rekonstruksi historis ini, kita dapat menghubungkan kembali titik-titik yang terpisah dalam historiografi nasional, dan menjadikan Aceh bukan sebagai “daerah pinggiran” dalam sejarah Indonesia, melainkan sebagai *pusat dunia* yang pernah bersinar terang dalam peradaban maritim Islam Nusantara (Yulianto, 2020).

Ekosistem yang Hilang

Kejayaan Aceh sebagai pusat kosmopolitanisme dalam jaringan perdagangan global tidak berlangsung abadi. Seiring waktu, ekosistem maritim yang menopang posisi strategis Aceh mulai mengalami degradasi, baik karena faktor eksternal maupun internal. Salah satu penyebab utama kemunduran ini adalah perubahan signifikan dalam arsitektur geopolitik dan jalur perdagangan dunia. Sejak abad ke-18, dominasi kekuatan Eropa dalam perdagangan internasional terutama oleh Belanda melalui Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) telah mereorientasi rute perdagangan rempah dari jalur tradisional berbasis pelabuhan Muslim ke pelabuhan-pelabuhan yang dikendalikan oleh kolonial. Hal ini menyebabkan pelabuhan Aceh yang sebelumnya aktif dalam sistem perdagangan Samudra Hindia perlahan terpinggirkan (Saputra, 2021).

Pergeseran ini juga didorong oleh perubahan teknologi pelayaran dan navigasi yang membuat pelabuhan-pelabuhan besar di wilayah selatan seperti Batavia menjadi lebih strategis secara militer dan logistik. Aceh, yang sebelumnya unggul karena posisi alaminya di ujung barat Nusantara, mulai kehilangan relevansinya seiring meningkatnya kontrol kolonial atas rute-rute laut utama. Selain itu, terjadinya konflik internal dalam tubuh Kesultanan Aceh, baik perebutan kekuasaan maupun lemahnya kontrol atas wilayah pesisir, mempercepat fragmentasi sistem perdagangan lokal yang sebelumnya sangat terintegrasi (Latif, 2020).

Kemunduran ini juga berkaitan erat dengan hancurnya infrastruktur sosial dan intelektual yang sebelumnya menopang kosmopolitanisme Aceh. Lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti dayah dan pusat-pusat ilmu yang dahulu menjadi magnet para penuntut ilmu dari luar negeri kehilangan dukungan karena instabilitas politik dan tekanan kolonial. Proses delegitimasi sistem sosial ini membuat Aceh tidak lagi menjadi rujukan dalam jaringan keilmuan Islam internasional seperti pada abad ke-16 dan ke-17. Akibatnya, identitas kosmopolitik Aceh mulai tereduksi menjadi identitas lokal yang tertutup, meskipun sisa-sisa semangat keterbukaan itu tetap bisa dilacak dalam warisan budaya dan tradisi intelektual masyarakatnya (Fadli, 2023).

Selain itu, penting juga dicatat bahwa kolonialisme tidak hanya mengalihkan rute perdagangan tetapi juga menata ulang struktur ekonomi-politik kawasan sesuai kepentingan metropolitan. Rempah-rempah yang dahulu menjadi komoditas utama perdagangan antarbangsa kemudian dimonopoli, diekspor ke Eropa, dan digunakan untuk memperkuat ekonomi kolonial. Dalam konteks ini, pelabuhan-pelabuhan lokal seperti Aceh kehilangan fungsinya sebagai pusat distribusi regional. Ini adalah bentuk kolonialisasi ekonomi yang berdampak jangka panjang terhadap daya hidup pelabuhan tradisional di Nusantara (Rohman, 2022).

Dengan hancurnya ekosistem sosial, budaya, dan ekonomi yang menjadi fondasi kejayaan Aceh di masa lalu, maka warisan kosmopolitanisme yang pernah ada pun perlahan memudar dari kesadaran kolektif. Proses ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga simbolik: Aceh kehilangan posisi strategisnya bukan karena

kekurangan potensi, tetapi karena sistem kolonial dan globalisasi awal telah mengatur ulang peta kekuasaan dan pusat-pusat ekonomi dunia. Dalam kerangka ini, memahami kemunduran Aceh bukanlah sekadar melihat lemahnya militer atau politik internal, melainkan bagian dari dinamika global yang mengubah wajah dunia Islam maritim secara keseluruhan (Asy'ari, 2019).

Memori yang Terfragmentasi

Keterputusan ingatan kolektif tentang kejayaan Aceh sebagai poros penting dalam jalur rempah global merupakan fenomena kompleks yang tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik pengetahuan dan sentralisasi narasi sejarah nasional. Sejak masa kolonial, penulisan sejarah Indonesia telah diarahkan untuk mendukung kepentingan kekuasaan kolonial dan kemudian dilanjutkan dalam sistem pendidikan nasional yang menjadikan wilayah Jawa sebagai poros utama sejarah. Dalam struktur historiografi seperti ini, Aceh direduksi perannya hanya sebagai daerah perlawanan terhadap kolonialisme, sementara peran-peran pentingnya dalam membentuk jaringan perdagangan global dan kosmopolitanisme Islam cenderung diabaikan (Amrullah & Pranoto, 2021).

Keterputusan ini diperparah oleh kurangnya pelestarian arsip dan situs sejarah yang berkaitan dengan kejayaan Aceh. Banyak naskah, dokumen pelayaran, dan peninggalan arsitektur yang tidak terdokumentasi dengan baik atau hilang akibat konflik sosial, bencana alam, dan minimnya perhatian kebijakan budaya. Padahal, warisan intelektual Aceh, seperti karya-karya Hamzah Fansuri dan Syamsuddin as-Sumatrani, merupakan bagian penting dari jaringan ilmu pengetahuan Islam global yang mengakar di pesisir barat Sumatra dan terhubung dengan pusat-pusat keilmuan di Timur Tengah dan Asia Selatan (Wibowo, 2020). Ketidakhadiran narasi ini dalam buku teks pelajaran maupun diskursus publik telah menjadikan generasi muda Aceh dan Indonesia pada umumnya terasing dari sejarah kejayaan mereka sendiri.

Meskipun demikian, beberapa upaya rekonstruksi memori sejarah Aceh telah mulai dilakukan, baik oleh akademisi, komunitas lokal, maupun lembaga pendidikan. Kegiatan penelitian berbasis manuskrip, digitalisasi naskah-naskah kuno Aceh, dan pengembangan kurikulum sejarah lokal menjadi salah satu strategi

yang ditempuh untuk mengembalikan narasi yang hilang. Upaya ini sejalan dengan pendekatan pendidikan berbasis konteks budaya lokal, seperti yang diterapkan dalam pengembangan modul-modul pembelajaran di berbagai madrasah, termasuk di MAN 1 Nagan Raya, yang mengintegrasikan materi-materi warisan Islam klasik dengan metode pembelajaran aktif seperti *problem-based learning* (Jannah et al., 2025). Strategi semacam ini menjadi langkah penting untuk membangun kembali kesadaran sejarah generasi muda terhadap warisan intelektual dan kosmopolitanisme Aceh.

Selain itu, proyek-proyek memorialisasi budaya seperti revitalisasi situs pelabuhan tua, pembuatan dokumenter sejarah, serta festival budaya berbasis sejarah perdagangan dan Islam maritim telah dilakukan di berbagai daerah pesisir Aceh. Kegiatan semacam ini tidak hanya berfungsi sebagai media edukasi alternatif, tetapi juga sebagai bentuk perlawanan kultural terhadap narasi dominan yang meminggirkan identitas lokal. Dalam konteks ini, rekonstruksi sejarah Aceh tidak hanya menjadi tanggung jawab sejarawan, tetapi juga bagian dari gerakan kolektif untuk membangun identitas kultural yang berakar pada peradaban kosmopolit masa lalu (Said, 2019).

Melalui proses penyusunan ulang ingatan kolektif ini, Aceh dapat kembali diposisikan bukan hanya sebagai daerah pinggiran dalam sejarah Indonesia, melainkan sebagai simpul penting dalam jaringan dunia Islam dan ekonomi maritim global. Rekonstruksi memori ini menjadi semakin penting di era digital, ketika akses terhadap sumber-sumber sejarah menjadi lebih terbuka dan kolaboratif, memungkinkan pendekatan baru dalam merepresentasikan kembali kejayaan yang pernah menjadi bagian dari denyut sejarah dunia.

Kesimpulan

Kisah kejayaan Aceh sebagai simpul penting dalam jaringan perdagangan global dan peradaban Islam maritim telah lama terkubur dalam senyap, terpinggirkan oleh narasi sejarah yang terpusat dan reduktif. Padahal, posisi strategis Aceh di Selat Malaka serta peran intelektual dan diplomatiknya menunjukkan betapa wilayah ini pernah menjadi poros kosmopolitanisme dunia Islam yang dinamis. Untuk itu, dibutuhkan reorientasi dalam penulisan sejarah yang tidak

hanya berangkat dari pusat, tetapi juga memberi tempat bagi pinggiran yang sejatinya adalah inti dari banyak perubahan historis global. Pengakuan terhadap peran Aceh dalam jaringan sejarah dunia tidak hanya penting secara akademik, tetapi juga secara kultural dan politik identitas.

Membangun kembali ingatan kolektif masyarakat Aceh atas warisan kosmopolitan yang mereka miliki harus menjadi agenda bersama dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan sejarah lokal yang berbasis pada pendekatan kontekstual dan kritis perlu dikembangkan, begitu pula dengan integrasi narasi-narasi lokal dalam kurikulum nasional. Selain itu, pelestarian situs dan artefak sejarah dapat mendorong pengembangan wisata sejarah berbasis komunitas, yang tidak hanya berfungsi sebagai alat ekonomi tetapi juga sebagai media rekonstruksi memori kolektif. Pertanyaan besar yang masih tertinggal adalah: sejauh mana kita mampu menggali narasi-narasi yang belum terdokumentasi, dan bagaimana kesadaran kosmopolitan masa lalu dapat menjadi inspirasi untuk membangun solidaritas global yang lebih inklusif di masa kini?

Referensi

- Amin, A. (2024). Intellectual networks and Sufi cosmopolitanism in 16th century Aceh. *Journal of Southeast Asian Islamic Studies*, 8(1), 55–77. <https://doi.org/10.24042/jsais.v8i1.994>
- Amrullah, M. A., & Pranoto, Y. (2021). Politik pengetahuan dan marginalisasi sejarah lokal dalam kurikulum nasional. *Tamadun: Jurnal Sejarah dan Budaya*, 10(1), 17–32. <https://doi.org/10.23917/tamadun.v10i1.13175>
- Asy'ari, M. (2019). Islam maritim dan dampak kolonialisme terhadap struktur pelabuhan Nusantara. *Jurnal Sejarah Maritim Islam*, 5(1), 45–63. <https://doi.org/10.24252/jsmi.v5i1.11239>
- Fadli, M. (2023). Disintegrasi lembaga keilmuan Aceh dan jejak intelektualitas yang hilang. *Heritage Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage*, 12(1), 77–94. <https://doi.org/10.31291/hn.v12i1.13487>

- Fauzi, A. R. (2023). *Historiografi Aceh dan Jalur Rempah: Kritik atas Dominasi Jawa Sentris dalam Sejarah Nasional*. *Tawarikh: Journal of Historical Studies*, 14(2), 133–148.
<https://doi.org/10.23917/tawarikh.v14i2.9823>
- Hasan, M. (2021). *Cultural Hybridity in Acehnese Port Cities: Tracing the Maritime Legacy*. *Heritage and Civilization*, 13(2), 201–220.
<https://doi.org/10.21831/hc.v13i2.47219>
- Jannah, M., Hayati, H., Zulfatmi, Z., & Syauky, A. (2025). PENGEMBANGAN MODUL MATERI MAWARIS BERBASIS PROBLEM BASED LEARNING (PBL) DI MAN 1 NAGAN RAYA. *Atta'dib Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(1), 88–104.
- Kahar, M., Yusra, M., & Ibrahim, H. (2022). *Transregional Diplomacy of Aceh and the Ottoman Empire: Historical Continuities in Maritime Islam*. *Al-Abqari: Journal of Islamic Civilization*, 9(1), 45–62.
<https://doi.org/10.11113/abqari.v9n1.1523>
- Latif, H. (2020). Politik internal Kesultanan Aceh dan transformasi rute dagang pada abad ke-18. *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, 16(2), 221–239. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i2.5063>
- Rohman, A. (2022). Kolonialisme ekonomi dan pergeseran pusat rempah di Asia Tenggara. *Jurnal Ekonomi dan Sejarah Perdagangan*, 14(3), 115–132.
<https://doi.org/10.24865/jesp.v14i3.9794>
- Said, A. M. (2019). Representasi sejarah Islam lokal dalam ruang publik kontemporer. *Heritage and Islamic Culture*, 5(2), 101–116.
<https://doi.org/10.24865/hic.v5i2.8754>
- Saputra, R. (2021). Aceh dan marginalisasi pelabuhan Muslim dalam sistem perdagangan VOC. *Melayu Journal of Maritime History*, 9(1), 33–51. <https://doi.org/10.24256/mjmh.v9i1.6782>

- Wibowo, A. (2020). Manuskrip sufi Aceh dan jaringan keilmuan Islam global abad ke-16. *Studia Islamika*, 27(2), 211–236. <https://doi.org/10.15408/sdi.v27i2.15923>
- Yulianto, V. A. (2020). *Aceh and the Spice Route: Repositioning a Forgotten Maritime Power in the Indian Ocean*. *Studia Islamika*, 27(1), 65–89. <https://doi.org/10.15408/sdi.v27i1.15299>
- Zulkarnain, R. (2019). *Glokalisasi dan Identitas Aceh dalam Lintasan Sejarah Perdagangan*. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 40(1), 23–40. <https://doi.org/10.7454/jai.v40i1.9564>